Hukum Adat.

Seorang janda yang melakukan mekidiang raga hanya berhak membawa harta guna kaya atau harta pencahariannya sendiri

PUTUSAN
Reg. No. 429 K/Pdt/1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.**

MAHKAMAH AGUNG.

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Simpen tinggal di Banjar Telengan, Perbekelan Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, pemohon kasasi dahulu tergugat terbanding;

m e l a w a n

I Made Kakak Latri, (tinggal di Banjar Telengan, Perbekelan Gegelang, Kecamatan Manggis tersebut termohon kasasi dahulu penggugat pembeding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa mendiang suami isteri *I Tulak Panggih* dan *Ni Panggih* dalam perkawinannya mempunyai seorang anak wanita bernama *Ni Teke* yang sudah kawin keluar, maka suami isteri tersebut menjadi campur atau putung;

bahwa sepeninggal *I Tulak Panggih*, *Ni Panggih* hidup menjanda dan menguasai harta-harta peninggalan suaminya tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

bahwa pada tanggal 19 Juni 1967 *Ni Panggih* tanpa paksaan dari manapun melakukan perbuatan menyerahkan diri atau mekidiang raga

kepada penggugat asli dihadapan Camat Manggis

bahwa pada waktu Ni Panggih mekidiang raga disertai pula dengan harta kekayaannya yaitu berupa 2 (dua) cutak sawah yang perincian mengenai letak, luas, nomor persil dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan;

bahwa juga penggugat asli selaku orang yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkenaan dengan Ni Panggih telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Telah melakukan upacara Pitra Yadnya /Ngaben terhadap jasad atau mayat mendiang Ni Panggih yang meninggal tanggal 21 Nopember 1967;
2. Penggugat asli telah mengambil alih segala kewajiban yang berkenaan dengan kegiatan pekraman atau kemasyarakatan baik ikatan banjar maupun desa;

bahwa semenjak penyerahan atau mekidiang raga Ni Panggih kepada penggugat asli, maka terhadap tanah peninggalan tersebut penggugat asli telah menguasai dan mengkasili serta membayar pajak sebagaimana mestinya;

bahwa dengan melawan hukum tanah tersebut diatas sejak tahun 1982 diambil secara paksa dan dikasili oleh tergugat asli;

bahwa perbuatan tergugat asli tersebut atas dasar perintah Pengadilan Negeri Amlapura, dimana I Simpen/tergugat asli telah dinyatakan sebagai ahli waris dari mendiang I Gunung menurut keterangan Perbekel,

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat asli mohon atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) lebih dahulu dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Ni Panggih adalah isteri yang syah dari mendiang I Tulak Panggih;
3. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa tanah cidera adalah harta peninggalan dari I Tulak Panggih;
4. Menyatakan hukum dan menetapkan mendiang Ni Panggih berhak atas peninggalan mendiang suaminya (ITulak Panggih);
5. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Ni Panggih adalah syah telah menyerahkan diri atau mekidiang raga kepada I Made Kakak Latri;
6. Menyatakan hukum dan menetapkan I Made Kakak Latri berhak

menerima harta bawaan dan peninggalan dari mendiang Ni Panggih;

7. Menyatakan hukum dan menetapkan sita titipan (conservatoir beslag) syah dan berharga;

8. Menghukum pihak tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah cidera dipandang perlu pelaksanaannya hendaknya dibantu oleh pihak Polri atau yang berwajib;

9. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan dipandang patut;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Amlapura telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 Januari 1983 No.1/Pts. Pdt. G/1983 PN. Amlapura;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 19 Juli 1983 No. 69/Pdt/1983 PTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 20 Januari 1983, Nomor: 1/Pts.Pdt. G/1983/PN. Amlapura yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat pembanding untuk sebagian;

Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Ni Panggih adalah isteri yang sah dari I Tulak Panggih;

Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa tanah cidera adalah harta peninggalan dari I Tulak Panggih;

Menyatakan dan menetapkan mendiang Ni Panggih berhak atas peninggalan mendiang suaminya (ITulak Panggih);

Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Ni Panggih adalah sah telah menyerahkan diri atau mekidiang raga kepada I Made Kakak Lastri

Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa I Made Kakak Lastri berhak menerima harta bawaan dan peninggalan mendiang Ni Panggih;

Menghukum pihak tergugat terbanding atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah cidera kepada penggugat pembanding dalam keadaan aman dan bila dipandang perlu pelaksanaannya dibantu pihak Polri atau yang berwajib;

Menolak gugatan penggugat pembanding atau selebihnya;

Menghukum tergugat terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 17 Agustus 1983 kemudian terhadapnya oleh tergugat terbanding, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 17/Pdt. G/1983/PN.Amlapura yang dibuat oleh Pjs. Panitera Kepala Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 1983;

bahwa setelah itu oleh penggugat pembeding yang pada tanggal 21 Oktober 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 3 Nopember 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus di pergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pe-

mohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengesampingkan alat bukti T.4 dan 8, karena T. 4 adalah surat keterangan Perbekel yang menerangkan adanya hubungan waris purusa antara I Panggih dengan pemohon kasasi/tergugat asal dan T. 8 ialah tentang silsilah kekeluargaan dan hal ini selaras pula dengan keterangan saksi I Nyoman Runia;
2. bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dan menerapkan hukum acara karena syarat yang harus dipenuhi untuk syahnya menyerahkan diri ialah adanya hubungan akhli waris purusa antara yang menyerahkan diri dan yang menerima penyerahan diri;

bahwa bukti P. 1 adalah berita acara penyerahan diri, belum ada Akta Penyerahan Diri, berita acara tersebut bertanggal 28 Nopember 1967, sedang Ni Panggih meninggal pada tanggal 21 Nopember 1967;

3. bahwa tanah cidera adalah barang bawaan/barang pusaka asal dapat mewaris dari leluhur karenanya tidak dapat dialihkan/tidak dapat dibawa menyerahkan diri oleh Ni Panggih, sedang I Panggih campur/putung inaka menurut hukum adat waris Bali tanah cidera harus diwarisi oleh ahli waris purusa terdekat yaitu pemohon kasasi/tergugat asal;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena seorang janda yang melakukan mekidiang raga hanya berhak membawa harta guna kaya atau harta pencahariannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I Simpen tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya herbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi, I simpen tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juli 1983 No. 69/Pdt/1983/PTD.

Mengadili lagi:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum penggugat sekarang termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Juni 1983, dengan Olden Bidara SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, Ahmad Rusli Dermawan SH dan Zakir SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 1985, oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. I.G.N. Gde Djaksa SH dan Zakir SH Hakim-Hakim Anggauta, dan Nurita Dahlia, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN
No. 69/Pdt/1983/PTD.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, mengadili perkara perdata dalam tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Made Kakak Latri umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Telengan, Perbekelan Gegelang, Kecamatan Manggis, Daerah Tingkat II Karangasem, selanjutnya disebut penggugat pembeding:

m e l a w a n :

I. Simpen, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Telengan, Perbekelan Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, selanjutnya disebut: tergugat terbanding:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini yang termuat di dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 1983, No. 69/Pdt/1983/PTD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari penggugat pembeding tersebut;

Dan sebelum mengambil putusan akhir:

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membuka kembali pemeriksaan persidangan tingkat pertama mengenai perkara ini, yang tentang hari, tanggal dan jamnya harus selekas-lekasnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak dan saksi-saksi serta melaksanakan perintah Pengadilan Tinggi untuk mengadakan pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas dengan saksama;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan sela ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri

Amlapura dan segera setelah pemeriksaan selesai, mengirimkan kembali berkas perkara beserta berita acara yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi di Denpasar;

Menunda putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk memenuhi perintah Pengadilan Tinggi yang termuat dalam putusan selanya tersebut di atas, Pengadilan Negeri Amlapura telah mengadakan pemeriksaan tambahan menurut petunjuk-petunjuk yang ditentukan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ternyata dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 1983;

Tentang hukumnya

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tetap bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut dengan ditambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 1 Juni 1983 No. 1/BA. Pdt. G/PN. Amlapura serta turunan-turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 20 Januari 1983, Nomor: 1/Pts. Pdt. G/1983/PN. Amlapura, maka ternyata dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut diperoleh hal-hal sebagai berikut:

bahwa penggugat perbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Ni Nengah Teke, anak kandung I Panggih dengan Ni Panggih yang telah kawin keluar;
2. I Nengah Degdeg, yaitu suami dari saksi 1 (menantu I Panggih dan Ni Panggih), yang pada pokoknya menerangkan:

bahwa memang benar tanah cidera berasal dari kumpi saksi 1, bernama I Gunung, kemudian diwarisi oleh anaknya bernama I Mintar, selanjutnya diwarisi oleh I Panggih (orang tua saksi 1);

bahwa silsilah dari orang bernama I Sri Danti saksi tidak tahu;

bahwa tidak ada hubungan keluarga antara tergugat terbanding dengan ayah saksi

bahwa tidak benar ahli waris terdekat dari I Panggih adalah tergugat terbanding;

bahwa memang benar Ni Panggih telah menyerahkan diri/mekidiang raga kepada orang bernama I Made Kakak Latri (penggugat pamban-

ding); dan membenarkan pula bahwa yang mengabenkan I Panggih dan Ni Panggih adalah I Made Kakak Latri (penggugat pbanding); bahwa tidak benar waktu pengabenan I Panggih dan Ni Panggih dibentuk Panitia;

bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah Saksi, pada lembaga "mekidiang raga" semua barang-barang yang menjadi miliknya, baik itu berupa guna kaya maupun harta pusaka ikut dibawa dalam penyerahan diri (mekidihang raga) tersebut;

bahwa saksi penggugat pbanding yang lain yakni;

3 I Nyoman Gde Manderi, yaitu Klian Dinas Banjar Telengan;

4. I Gede Simpen, yaitu Perbekel Desa Gegelang, pada pokoknya menerangkan:

bahwa saksi memang mengetahui sendiri pada waktu Ni Panggih menyerahkan diri/mekidihang raga, karena saksi ikut menyaksikan dihadapan Camat Manggis;

bahwa memang benar yang mengabenkan I Panggih dan Ni Panggih adalah I Made Kakak Latri (penggugat pbanding);

bahwa sudah menjadi kebiasaan menurut Adat di daerah Saksi (Banjar Telengan) apabila orang menyerahkan diri dalam keadaan campur, maka seluruh harta, baik harta guna kaya maupun harta pusaka ikut dibawa menyerahkan diri/mekidiang raga;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat pbanding berupa surat-surat bertanda P.I s/d. P.V, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat terbanding, baik berupa seorang saksi bernama I Nyoman Runia, maupun surat-surat bertanda T.1 s/d. T.10, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertama-tama Pengadilan Tinggi sependapat dengan telah terbuktinya bahwa tanah cidera asal milik I Gunung kemudian sampai diwarisi oleh I Panggih;

Menimbang bahwa tentang hal tergugat terbanding menyatakan dirinya sebagai ahli waris terdekat dari I Panggih, yakni bukti T.4 yang berupa surat keterangan yang dibuat oleh Perbekel Desa Gegelang dan T.8 yaitu silsilah kekeluargaan yang diajukan oleh tergugat terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan, oleh karena dari keterangan saksi penggugat pbanding bernama Ni Nyoman Teke, yakni anak kandung I Panggih dengan Ni Panggih telah dibantah, disamping itu Perbekel Desa Gegelang yang membuat surat keterangan (bukti T.4) telah didengar keterangannya

sebagai saksi penggugat pbanding, membenarkan Ni Panggih telah menyerahkan diri/mekidihang raga kepada penggugat pbanding dihadapan Camat Manggis, karena menyaksikan penyerahan diri/mekidihang raga tersebut dan tidak ada yang menyatakan keberatan; dengan demikian terbukti bahwa tergugat terbanding tidak ada hubungan kekeluargaan dengan I Panggih;

Menimbang bahwa tentang hal Ni Panggih telah menyerahkan diri/mekidihang raga kepada penggugat pbanding, yakni bukti P.V yang berupa surat pengeling-ngeling dan bukti P.I yang berupa Berita Acara penyerahan diri/mekidihang raga yang dibuat oleh Camat Manggis tanggal 28 Nopember 1967, No. 7/1967, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

bahwa bukti P.V tersebut isinya adalah pernyataan penyerahan diri/mekidihang raga dari Ni Panggih kepada penggugat pbanding yang ditulis dengan huruf Bali demikian juga bahasanya, pada tanggal 22 Februari 1967 dan telah disaksikan oleh Pejabat Desa Telengan, kemudian hal ini dikuatkan secara lisan pada tanggal 10 Juni 1967 dan dibuatkan berita acara penyerahan diri oleh Camat Manggis (bukti P.I), dengan demikian bukti P.I merupakan realisasi dari bukti P.V, hal inipun diperkuat lagi oleh ke empat orang saksi penggugat pbanding, terbukti dari Perbekel Desa Gegelang sendiri: I Gede Simpen, ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam berita acara tersebut;

bahwa dari hal tersebut maka terbuktilah bahwa Ni Panggih telah menyerahkan diri kepada penggugat pbanding;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Amlapura pada lembaga mekidihang raga, bahwa seluruh harta yang menjadi haknya ikut dibawa kepada orang yang menerima penyerahan diri tersebut;

Menimbang bahwa bukti tergugat terbanding bertanda T.1 yakni turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Karangasem tanggal 18 Juli 1963 No. 905/KA/1962 dan bukti bertanda T.2 yakni turunan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Mei 1975, No. 183/PTD/1966/Pdt yang telah mempunyai kekuatan hukum, setelah diteliti ternyata dalam amar putusannya menetapkan, bahwa tanah cidera adalah milik I Panggih, sedangkan bukti bertanda T.3 s/d. T.10 adalah merupakan realisasi dari bukti T.2 tersebut;

Menimbang bahwa tentang permohonan penggugat pbanding menaruh sita jaminan terhadap tanah sengketa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa tentang hal itu adalah wewenang Pengadilan Tingkat

Pertama, dimana Pengadilan Tingkat Pertama menolak permohonan tersebut dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal itu;

Menimbang bahwa surat tanggapan yang diajukan oleh tergugat terbanding bertanggal Telengan, 11 Juli 1983 tidak memperkuat putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut, dan tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan penggugat pbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka penggugat pbanding berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat terbanding tidak berhasil melemahkan dalil-dalil gugatan tersebut, oleh karena itu gugatan penggugat pbanding harus dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 20 Januari 1983, Nomor 1/Pts. Pdt/. G/1983/PN. Amlapura yang menolak gugatan penggugat pbanding harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu tergugat terbanding ada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 20 Januari 1983, Nomor: 1/Pts. Pdt. G/1983/PN. Amlapura yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat pbanding untuk sebagian;

Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Ni Panggih adalah istri yang sah dari I Tulak Panggih;

Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa tanah cidera adalah harta peninggalan dari I Tulak Panggih;

Menyatakan dan menetapkan mendiang suami Ni Panggih berhak atas peninggalan mendiang suaminya (I Tulak Panggih);

Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Ni Panggih adalah sah telah menyerahkan diri atau mekidihang raga kepada I Made Kakak Latri,

Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa I Made Kakak Latri berhak menerima harta bawaan dan peninggalan mendiang Ni Panggih;

Menghukum pihak tergugat terbanding atau siapaun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah cidera ke-

pada penggugat pembanding dalam keadaan aman dan bila dipandang perlu pelaksanaannya dibantu pihak Polri atau yang berwajib;

Menolak gugatan penggugat pembanding yang selebihnya;

Menghukum tergugat terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 19 Juli 1983 oleh kami **Sudiarti Salman SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi tersebut dengan dihadiri oleh **Cokorda Alit Agung Panitera Pengganti**, diluar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

PUTUSAN SELA.
No: 69/Pdt/1983/PTD.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar, mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Tunggal atas penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dalam sidangnya telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara:

I Made Kakak Latri, umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Telengan, Perbekelan Gegelang, Kecamatan Manggis, Daerah Tingkat II Karangasem yang selanjutnya disebut: penggugat pbanding;

m e l a w a n

I Simpen, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Telengan, Perbekelan Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, yang selanjutnya disebut: tergugat terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya

Mengutip serta memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 20 Januari 1983, Nomor: 1/Pts. Pdt. G/1983/PN. Amlapura, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.900,- (delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Pjs. Panitera Kepala Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 1983 penggugat pbanding menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Pebruari 1983;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut penggugat pbanding telah mengajukan memori banding bertanggal Telengan, 14 Maret 1983 dan telah diberitahukan kepada

tergugat terbanding pada tanggal 18 Maret 1983 serta telah diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi;

Tentang hukumnya

Menimbang bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka oleh karenanya permohonan itu haruslah diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca berita acara persidangan Pengadilan Negeri Amlapura dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini berpendapat bahwa masih perlu diadakan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini karena masih belum jelas dengan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

I. Dipanggil dan ditanyakan kepada saksi Ni Nengah Teke:

1. bahwa apakah silsilah yang diajukan oleh tergugat terbanding itu benar dan benarkah tergugat terbanding masih ada hubungan keluarga dengan ayah saksi?
2. a. benarkah tanah sengketa/cidera milik I Gunung almarhum seperti apa yang dikemukakan oleh tergugat terbanding?
b. Apakah benar ahliwaris yang terdekat dari I Tulak Panggih itu adalah tergugat terbanding?

II. Dipanggil dan ditanyakan kepada para saksi: Ni Nengah Teke,

- I Nengah Degdeg, Kelian Banjar Telengan, Perbekel Gegelang:
- a. Apakah "mekidihang raga" Ni Panggih benar benar dilakukan dengan upacara adat dan siapa saja dari Pamong Desa yang hadir?
 - b. Siapakah yang mengabenkan mayat almarhum I Tulak Panggih dan Ni Tulak panggih?
 - c. Apakah untuk mengabenkan itu dibentuk panitia pengabenan bagi daerah para saksi?
 - d. Apakah menurut hukum adat yang berlaku di daerah para saksi pada lembaga "mekidihang raga" barang-barang yang dibawa dalam penyerahan diri tidak terbatas pada barang guna kaya saja, akan tetapi juga termasuk harta pusaka dan apakah barang pusaka dapat diwariskan juga oleh orang yang menerima mekidihang raga dari seseorang?

III. Diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura:

1. Supaya surat-surat berharga turunannya/fotocopynya yang belum dilegalisir oleh Kantor Pos disuruh supaya melegalisir dahulu;
2. Supaya meluruskan menurut prosedur hukum apakah benar tanah-

tanah/barang cidera diserahkan pada tergugat terbanding tanpa melalui prosedur hukum?

IV. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap bermanfaat demi sempurnanya pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka perlukah kiranya Hakim Tingkat Pertama memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memanggil saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk keperluan pemeriksaan seperti tersebut di atas, oleh Pengadilan Tinggi akan diperintahkan kepada Hakim Tingkat Pertama cq Pengadilan Negeri Amlapura yang untuk hal itu harus membuka kembali pemeriksaan persidangan dalam tingkat pertama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena masih diperlukan pemeriksaan tambahan, maka putusan tentang biaya perkara akan diambil bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari penggugat pbanding tersebut;

Dan sebelum mengambil putusan akhir:

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membuka kembali pemeriksaan persidangan tingkat pertama mengenai perkara ini, yang tentang hari, tanggal dan jamnya harus selekas-lekasnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak dan saksi-saksi serta melaksanakan perintah Pengadilan Tinggi untuk mengadakan pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas dengan saksama;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari Putusan Sela ini, dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dan segera setelah pemeriksaan selesai, mengirimkan kembali berkas perkara beserta berita-acara yang bersangkutan Pengadilan Tinggi di Denpasar;

Menunda putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir.

Demikianlah diputuskan pada hari jum'at, tanggal 29 April 1983 oleh kami: Sugiarti Salman SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam si-

dang terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi tersebut, dengan diha-
diri oleh Cokorda Alit Agung, panitera Pengganti pada Pengadilan Ting-
gi tersebut, diluar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

PUTUSAN
Nomor: 1/Pts. Pdt. G/1983/PN.Amlapura

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaranya:

I Made Kakak Latri, umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Telengan, Perbekelan Gegelang, Kecamatan Manggis, Daerah Tingkat II Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat;

m e l a w a n

I Simpen, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Telengan, Perbekelan Gegelang, Kecamatan Manggis, Daerah Tingkat II Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut, telah;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan kedua belah pihak;

Tentanguduknya perkara

Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 31 Desember 1982 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal itu juga penggugat telah menggugat tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa mendiang suami isteri I Tulak Panggih dan Ni Panggih dalam perkawinannya mempunyai seorang anak wanita bernama Ni Teke yang sudah kawin keluar, maka dari itu keadaan suami istri tersebut menjadi campur atau putung;
2. Bahwa setelah meninggalnya I Tulak Panggih, Ni Panggih hidup menjanda seorang diri serta menguasai dan menikmati harta-harta peninggalan suaminya tanpa pernah ada gangguan dari pihak manapun;
3. Bahwa menyadari hidupnya Ni Panggih tidak ada anak yang akan mengayomi didalam ia menghabiskan sisa hidupnya, maka dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan serta tekanan pihak manapun melakukan perbuatan yaitu berupa menyerahkan diri atau mekidiang raga kepada I Made Kakak Lastri dari Banjar Telengan, Desa Gegelang, Ke-

camatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

4. Bahwa perbuatan penyerahan diri atau mekidiang rasa yang dilakukan oleh Ni Panggih semasa hidupnya dilakukan pada tanggal 19 Juni 1967 dihadapan Camat Manggis;

5. Bahwa segala tata cara yang berkenaan dengan upaya penyerahan diri atau mekidiang raga sebelum Ni Panggih meninggal (Ni Panggih meninggal pada tanggal 21 Nopember 1967) telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa pada waktu Ni Panggih mekidiang raga disertai pula dengan harta kekayaan yang berupa dua (2) cutak sawah yang masing-masing sebagai berikut;

Tanah sawah yang terletak di Buisi No. 52 urut no. 43 persil 25 klas I luas 0,295 Ha. atas nama I Mintar dan sekarang tanah tersebut atas nama I Made Kakak Latri dengan batas-batas yaitu:

Sebelah utara: I Wayan Tamir,

Sebelah timur; Jalan,

Sebelah selatan: Paluh/Parit,

Sebelah barat: Bukti Kasceti;

Tanah sawah yang terletak di Subak Buisi dan urut no. 22 klas I luas 0,100 Ha. atas nama I Gunung dan sekarang tersebut atas nama I Made Kakak Latri dengan batas-batas yaitu;

Sebelah utara: Kuburan,

Sebelah timur: Telabah/Kali,

Sebelah selatan: Paluh/Parit,

Sebelah barat: Jalan;

juga terhadap I Made Kakak Latri sebagai orang yang diserahi atau menerima Ni Panggih untuk dipelihara, dibebankan kewajiban-kewajiban yang menyangkut sekala niskala;

7. Bahwa I Made Kakak Latri selaku orang yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkenaan dengan Ni Panggih telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Telah melakukan Upacara Pitra Yadnya/Ngaben terhadap jasad atau mayat dari mendiang Ni Panggih;

2. I Made Kakak Latri telah mengambil alih segala kewajiban yang berkenaan dengan kegiatan pekraman atau kemasyarakatan baik ikatan banjar maupun desa;

8. Bahwa semenjak penyerahan atau mekidiang raga Ni Panggih kepada I Made Kakak Latri, maka terhadap tanah peninggalan tersebut di atas oleh I Made Kakak Latri telah menguasai dan menghasili serta membayar pajak sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan melawan secara hukum tanah tersebut diatas sejak tahun 1982 diambil secara paksa dan dihasili oleh I Simpen;

10. Bahwa segala perbuatannya I Simpen tersebut diatas dilakukan atas dasar Perintah Pengadilan Negeri Amlapura, di mana I Simpen telah dinyatakan sebagai ahli waris dari mendiang I Gunung, menurut keterangan Perbekel;

11. Bahwa agar jangan pihak penggugat dirugikan lebih jauh oleh tergugat serta jangan sampai tanah tersebut dipindah tangankan yang pada akhirnya obyek perkara menjadi kabur, maka bersama ini kami mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memerintahkan dengan segera meletakkan sita titipan (conservatoir beslag) terhadap tanah-tanah tersebut diatas;

Bahwa dengan mengemukakan hal-hal tersebut diatas bersama ini kuasa penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sbb;

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Ni Panggih adalah istri yang syah dari mendiang I Tulak Panggih;
3. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa tanah cidera adalah harta peninggalan dari I Tulak Panggih;
4. Menyatakan hukum dan menetapkan mendiang Ni Panggih berhak atas peninggalan mendiang suaminya (ITulak Panggih);
5. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Ni Panggih adalah syah telah menyerahkan diri atau mekidiang raga kepada I Made Kakak Latri
6. Menyatakan hukum dan menetapkan I Made Kakak Latri berhak menerima harta bawaan dan peninggalan dari mendiang Ni Panggih;
7. Menyatakan hukum dan menetapkan sita titipan (conservatoir beslag) syah dan berharga;
8. Menghukum pihak tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah cidera kepada penggugat dalam keadaan lasya atau aman dan bila dipandang perlu pelaksanaannya hendaknya dibantu oleh pihak Polri atau yang berwajib;
9. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

a t a u

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan dipandang patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua

belah pihak datang menghadap, yang oleh kami telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil, maka setelah gugatan dibacakan pemeriksaan lalu diteruskan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat pada pokoknya menjawab sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Ni Panggih telah menyerahkan diri kepada penggugat dengan membawa tanah sengketa sebab tanah sengketa, bukan, milik Ni Panggih melainkan milik almarhum I Gunung;

Bahwa I Gunung menurunkan I Mintar, I Mintar menurunkan I Panggih dan I Panggih menurunkan Ni Teke yang kini sudah kawin keluar;

I Gunung sekarang camput dan ahli warisnya yang terdekat adalah tergugat sendiri dan yang patut mewarisi harta peninggalannya;

Bahwa oleh karena I Gunung camput maka sepeninggal I Panggih dan Ni Panggih, tergugatlah yang menguasai dan menghasili tanah sengketa;

Bahwa yang mengabenkan Ni Panggih adalah tergugat sedangkan penggugat sama sekali tidak ada hubungan "sidikara" dengan I Panggih; gih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Foto copy Berita Acara No. 7/1967 tanggal 28 Nopember 1967 yang diberi tanda P.I;
2. Foto copy silsilah tertanggal 28 Nopember 1967 yang diberi tanda P.II;
3. Foto copy surat Ipeda atas nama I Made Kakak Latri yang diberi tanda P.III;
4. Foto copy surat keterangan tertanggal 20 Juli 1982 yang diberi tanda P.IV;
5. Foto copy surat huruf Bali yang diberi tanda P.V;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Nengah Teke,

Bahwa saksi adalah anak I Panggih;

Bahwa yang mengabenkan I Panggih adalah penggugat;

2. Saksi I Nengah Degdeg;

Bahwa I Panggih diabenkan oleh penggugat sebab istrinya telah menyerahkan diri kepada penggugat;

Bahwa antara I Panggih dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi adalah menantu I Panggih.;

3. Saksi I Wayan Rugeg,

Bahwa yang mengabenkan I Panggih dan Ni Panggih adalah penggugat;

Bahwa hal ini saksi tahu karena saksi diundang oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya tergugat mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Turunan putusan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Karangasem tanggal 20 Juli 1963 No. 965/PA/1962 yang diberi tanda T.1;
2. Turunan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Mei 1975 No. 193/PTD/1966/Pdt. yang diberi tanda T.2 ;
3. Berita acara pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 183/PTD/1966/pdt. yang diberi tanda T.3;
4. Foto copy surat keterangan tertanggal 27 Mei. 1976 yang setelah dicocokkan ddengan aslinya diberi tanda T.4,
5. Berita acara permohonan pelaksanaan putusan yang diberi tanda T.5;
6. Kwitansi panjar biaya eksekusi atas nama I Wayan Simpen yang di beri tanda T.6,
7. Berita acara panggilan tanggal 10 September 1976 yang diberi tanda T:7;
8. Surat keterangan silsilah yang diberi tanda T.8;
9. Berita acara melaksanakan putusan yang diberi tanda T.9;
10. Surat keterangan Pendaftaran Tanah yang diberi tanda T.10;

Menimbang, bahwa saksi tergugat pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I Nyoman Runia,

Bahwa I Panggih dan Ni Panggih diabenkan oleh tergugat;

Bahwa waktu pengabenan itu yang menjadi Ketua Panitia adalah I Dugdug Kelihan Dadia;

Bahwa pada waktu pengabenan itu penggugat juga ikut ngaben;

Bahwa saksi kenal baik pada I Panggih dan Ni Panggih;

Bahwa antara I Panggih dengan tergugat masih ada hubungan saling waris mewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan selanjutnya kedua belah pihak telah memohon putusan;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menggugat tergugat atas dalil:

Bahwa Ni Panggih yang dalam keadaan putung telah diabehkan oleh penggugat, semasa hidupnya telah menyerahkan diri kepada penggugat pada tanggal 19 Juni 1967 dihadapan Camat Manggis dengan membawa serta tanah-tanah sengketa dan tanah sengketa tersebut telah diambil secara paksa oleh tergugat pada tahun 1982 atas perintah Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa tergugat telah membantah gugatan penggugat atas dalil bahwa tergugatlah yang patut mewarisi peninggalan I Panggih;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti seperti yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak akan ditentukan terlebih dahulu hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak perlu dibuktikan ialah;

1. Bahwa letak, luas serta batas-batas tanah sengketa adalah seperti yang tercantum didalam surat gugatan;
2. Bahwa antara penggugat dengan I Tulak Panggih dan Ni Panggih tidak terdapat hubungan keluarga yang dengan sendirinya tidak ada hubungan waris;
3. Bahwa tanah sengketa bukan guna kaya Ni Panggih melainkan tanah warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat yang dipakai sebagai dasar hak untuk menuntut tanah sengketa;

Menimbang, bahwa pertama akan kami nilai bukti foto copy dari Berita Acara No. 7/1967 tertanggal 28 Nopember 1967 yang diberi tanda P.I;

Menimbang, bahwa berita acara tersebut yang dibuat oleh Camat Manggis menurut hemat kami tidak bernilai sebagai bukti bahwa Ni Panggih telah menyerahkan diri kepada penggugat dengan alasan suatu berita acara harus memuat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu berita acara itu dibuat,

Bahwa pada hari dan tanggal berita acara itu dibuat (28 Nopember 1967) Ni Panggih tidak ada datang menghadap kehadiran Camat yang bersangkutan untuk menyatakan niatnya menyerahkan diri kepada

penggugat karena pada tanggal 21 Nopember 1967 Ni Panggih telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berita acara tersebut dibuat berhubung dengan permohonan lisan Ni Panggih pada tanggal 19 Juli 1967 untuk menyerahkan waris dan ayahannya beserta dua cutak tanah sawah yaitu sawah sengketa;

Menimbang, bahwa permohonan berbeda dengan pernyataan;

Bahwa permohonan untuk menyerahkan diri belum berarti penyerahan diri itu sudah terjadi sebelum permohonan itu diputuskan apakah dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa pada waktu berita acara itu dibuat, Camat yang membuat berita acara itu secara sah mengetahui bahwa berdasarkan keterangan Keliang Dinas Banjar Telengan Ni Panggih telah meninggal pada tanggal 21 Nopember 1967;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya si pemohon (dalam hal ini Ni Panggih) sebelum berita acara tentang penyerahan waris beserta ayah dan tanah sengketa atas nama Ni Panggih kepada penggugat itu dibuat maka permohonan itu batal dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa pengalihan tanah sengketa dari atas nama I Mintar dan I Gunung menjadi atas nama penggugat atas dasar berita acara tertanggal 28 Nopember 1967 No. 7/1967 adalah tanpa alasan yang sah sebab:

I. Penggugat bukanlah ahli waris I Mintar dan I Gunung demikian juga penggugat bukanlah ahli waris I Tulak Panggih dan Ni Panggih;

II. Pada waktu berita acara itu dibuat Ni Panggih sudah meninggal dunia, sehingga berita acara itu tidak sah sebagai pernyataan penyerahan diri;

III. Berdasarkan pengakuan penggugat sendiri, pada waktu berita acara dimaksud dibuat tanah-tanah tersebut sedang menjadi obyek perkara di tingkat banding antara I Panggih dengan I Gede Pasek sehingga semua perbuatan hukum yang bermaksud mengalihkan atau memperjanjikan suatu obyek yang masih dalam sengketa adalah tidak sah sebab belum pasti statusnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.I kami menganggap tidak terbukti Ni Panggih telah menyerahkan diri kepada penggugat sebab disamping berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bukti P.I yang berupa foto copy itu tidak ternyata dilegalisasi oleh yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami akan mempertimbangkan bukti foto copy silsilah I Gunung yang diberi tanda P.II;

Menimbang, bahwa tentang silsilah I Gunung tergugat tidak mem-

bantah dengan penjelasan bahwa bapak I Gunung yaitu I Tridanti bersaudara kandung dengan kumpi tergugat yaitu I Nurami;

Menimbang, bahwa tentang tercantumnya tanah sengketa atas nama penggugat dalam surat Ipeda (P.III) tergugat tidak membantah, namun demikian baik bukti P.II maupun P.III itu tidak bernilai sebagai bukti karena tidak dilegalisasi oleh yang berwenang;

Menimbang, bahwa tentang bukti foto copy surat keterangan tertanggal 20 Juli 1982 (P.IV) yang dibuat oleh Keliang Dinas Telengan telah dibantah oleh tergugat dan penggugatpun membenarkan bahwa dirinya memang tidak ada hubungan waris dengan Ni Panggih maka kami menilai bahwa disamping surat keterangan itu tidak benar juga tidak bernilai sebagai alat bukti karena tidak dilegalisasi oleh yang berwenang;

Menimbang, bahwa tentang foto copy surat pengeling-eling huruf Bali (P.V) yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1967 Ni Panggih telah menyerahkan diri kepada penggugat dengan membawa serta tanah sengketa, menurut hemat kami bertentangan dengan dalil gugatan penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Ni Panggih telah menyerahkan diri kepada penggugat dihadapan Camat Manggis tanggal 19 Juli 1967 dalil mana tetap dipertahankannya, sehingga kami berkesimpulan bukti tersebut tidak dapat dipercaya apa lagi pada tahun-tahun tersebut sudah menjadi kebiasaan membuat pernyataan dalam huruf latin sebab huruf Bali hanya digunakan dalam hal-hal pihak-pihak hanya dapat membaca dan mengerti huruf Bali, sedangkan dalam hal ini kecuali Ni Panggih yang buta huruf, baik saksi maupun penggugat membubuhkan tanda tangan yang berarti mereka bisa membaca dan menulis dan disamping itu foto copy itu tidak dilegalisir oleh yang berwenang sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tanah sengketa adalah tanah pusaka I Gunung yaitu kakek I Panggih, bukan tanah guna kaya I Panggih bersama Ni Panggih hal mana dibenarkan dan tidak dibantah oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyerahan diri hanya harta guna kaya saja yang dapat dibawa menyerahkan diri sebab harta guna kaya adalah harta bebas karena didapat dari hasil jerih payah sendiri, sedangkan harta pusaka tidak boleh dibawa menyerahkan diri karena bukan hasil jerih payahnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah tanah pusaka I Gunung maka andaiatapun benar Ni Panggih telah menyerahkan diri kepada penggugat (apa lagi tidak) ia tidak boleh membawa ser-

ta tanah sengketa dalam penyerahan diri itu untuk menjadi miliknya penggugat setelah ia meninggal dunia, atas dasar:

I. Bahwa tanah sengketa adalah bukan guna kaya Ni Panggih melainkan tanah pusaka peninggalan I Gunung, yang setelah I Gunung meninggal patut diwarisi oleh I Mintar dan setelah I Mintar meninggal patut diwarisi oleh I Panggih;

yang apabila I Panggih campur patut diwarisi oleh ahli waris I Gunung dalam garis kesamping;

II. Bahwa Ni Panggih adalah janda dari pada almarhum I Panggih;

Bahwa janda tidak mempunyai hak waris atas harta pusaka sebab harta pusaka adalah harta turun temurun sehingga Ni Panggih tidak berhak untuk memindah tangankan tanah sengketa kepada siapapun juga termasuk penggugat;

III. Bahwa antara peninggal waris tanah sengketa (almarhum I Gunung) dengan penggugat sama sekali tidak ada hubungan keluarga baik "purusa" maupun "wadu" sehingga penggugat tidak patut memiliki tanah sengketa dengan dalih Ni Panggih telah menyerahkan diri kepada penggugat sebab harta warisan harus jatuh kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa tentang pengabenan Ni Panggih oleh penggugat kami anggap tidak terbukti sebab antara Ni Panggih dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga, apa lagi penggugat dengan tegas mengatakan tidak ikut "nyumbang" arwah Ni Panggih;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 patut ditolak sebab penggugat tidak ada kepentingan hukum atas penetapan Ni Panggih adalah istri sah I Panggih apa lagi Ni Panggih saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 agar ditetapkan tanah sengketa peninggalan I Tulak Panggih juga harus ditolak sebab tanah sengketa adalah peninggalan I Gunung yaitu kakek I Tulak Panggih dan I Tulak Panggih adalah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 juga harus ditolak sebab Ni Panggih adalah janda I Panggih, seorang janda bukanlah ahli waris apalagi terhadap harta pusaka;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 juga harus ditolak sebab tidak terbukti Ni Panggih telah menyerahkan diri kepada penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 juga harus ditolak sebab tanah sengketa bukan peninggalan Ni Panggih;

Menimbang, bahwa petitum angka 7,8 dan 9 juga harus ditolak sebab tidak ada alasan untuk menaruh sita conservatoir atas tanah sengketa dan penggugat tidak berhak atas tanah sengketa dan biaya perkara harus dipikul oleh pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa kami anggap perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat sebab tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi maka gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat berada pada pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.8.900, (delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 1983, oleh kami I Gusti Made Dada SH Hakim, putusan mana pada hari itu juga diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Nyoman Winggra Pjs. Panitera Kepala serta kedua belah pihak.